

BAB III

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA SOLO DAN KOTA SEMARANG TERHADAP POLITIK DINASTI PRESIDEN JOKOWI

3.1 Identitas Responden

Responden pada penelitian ini terdiri dari 100 masyarakat di Kota Solo dan 100 masyarakat di Kota Semarang, dengan rentang usia 17 hingga 74 tahun. Untuk Kota Solo, jumlah responden dibagi ke dalam 5 kecamatan dan 54 kelurahan, sedangkan untuk Kota Semarang jumlah responden dibagi ke dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan, dimana distribusi pembagiannya sama-sama disesuaikan dengan proporsi pada jumlah populasi di setiap wilayah. Adapun identitas responden jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

3.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengklasifikasian responden berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan untuk memahami perbedaan persepsi atau pandangan yang mungkin muncul antara laki-laki dan perempuan terkait politik dinasti Presiden Jokowi. Dari sisi psikologis, umumnya laki-laki memiliki sudut pandang yang lebih rasional dan logis, berbeda dengan perempuan yang cenderung lebih mengedepankan aspek emosional dalam memandang suatu hal. Berikut data identitas responden di Kota Solo dan Kota Semarang berdasarkan jenis kelaminnya:

Tabel 3. 1 Identitas Responden di Kota Solo dan Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin

Kota Solo			Kota Semarang		
Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	66	66	Laki-Laki	53	53
Perempuan	34	34	Perempuan	47	47
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Identitas Responden

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden di Kota Solo didominasi oleh masyarakat berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 66% atau 66 orang responden. Sementara itu, masyarakat berjenis kelamin perempuan yang menjadi bagian dari responden di Kota Solo berjumlah 34 orang, atau jika dipersentasekan sebesar 34%.

Adapun responden di Kota Semarang didominasi oleh masyarakat berjenis kelamin laki-laki sebanyak 53 orang, atau jika dipersentasekan menjadi 53% dari 100 responden. Jumlah ini lebih banyak dari responden perempuan yang berjumlah 47 orang, atau jika dipersentasekan menjadi 47% dari 100 responden. Apabila dibandingkan dengan responden di Kota Solo, jumlah responden laki-laki di Kota Semarang lebih sedikit 13% dan jumlah responden perempuan di Kota Semarang lebih banyak 13%.

Perlu dipahami, meskipun responden di Kota Solo dan Kota Semarang sama-sama didominasi oleh laki-laki, belum tentu cara pandang yang dihasilkan lebih rasional. Cara pandang masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, serta lingkungan sosial, sehingga baik laki-laki maupun perempuan akan memiliki dasar sudut pandang yang berbeda-beda.

3.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia

Usia merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan dalam menilai tingkat kematangan pikiran seseorang dalam memandang atau mempersepsikan suatu hal. Berdasarkan Permenkes No. 25 Tahun 2016, Kementerian Kesehatan membagi kategori usia menjadi sembilan kelompok, mulai dari masa balita pada rentang usia 0-5 tahun, masa kanak-kanak pada rentang usia 5-11 tahun. masa remaja awal pada rentang usia 12-16 tahun, masa remaja akhir pada rentang usia

17-25 tahun, masa dewasa awal pada rentang usia 26-35 tahun, masa dewasa akhir pada rentang usia 36-45 tahun, masa lansia awal pada rentang usia 46-55 tahun, masa lansia akhir pada rentang usia 56-65 tahun, serta masa manula pada usia lebih dari 65 tahun (Hepppy & Puspita, 2023).

Dalam penelitian ini, masyarakat yang menjadi bagian dari responden adalah masyarakat dengan rentang usia 17-74 tahun. Oleh karena itu, usia responden hanya dikategorikan menjadi enam kelompok usia, yaitu responden dengan rentang usia 17-25 tahun yang mewakili masyarakat remaja akhir, responden dengan rentang usia 26-35 tahun yang mewakili masyarakat dewasa awal, responden dengan rentang usia 36-45 tahun yang mewakili masyarakat dewasa akhir, responden dengan rentang usia 46-55 tahun yang mewakili masyarakat lansia awal, responden dengan rentang usia 56-65 tahun yang mewakili masyarakat lansia akhir, serta responden dengan usia lebih dari 65 tahun yang mewakili masyarakat manula. Berikut data identitas responden di Kota Solo dan Kota Semarang berdasarkan usianya:

Tabel 3. 2 Identitas Responden di Kota Solo dan Kota Semarang Berdasarkan Usia

Kota Solo			Kota Semarang		
Usia	Frekuensi	Persentase (%)	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
17 - 25 Tahun	23	23	17 - 25 Tahun	34	34
26 - 35 Tahun	19	19	26 - 35 Tahun	13	13
36 - 45 Tahun	24	24	36 - 45 Tahun	18	18
46 - 55 Tahun	19	19	46 - 55 Tahun	16	16
56 - 65 Tahun	12	12	56 - 65 Tahun	11	11
> 65 Tahun	3	3	> 65 Tahun	8	8
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Identitas Responden

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden di Kota Solo didominasi oleh masyarakat dewasa akhir dengan rentang usia 36 - 45 tahun sebesar

24%, atau 24 orang. Sementara itu, masyarakat remaja akhir dengan rentang usia 17 - 25 tahun menjadi yang terbanyak kedua dengan jumlah 23% atau 23 orang, diikuti dengan masyarakat dewasa awal dan lansia awal pada rentang usia 26 - 35 tahun dan 46 - 55 tahun sebanyak 19% atau 19 orang, masyarakat lansia akhir pada rentang usia 56 - 65 tahun sebanyak 12% atau 12 orang, serta masyarakat manula berusia lebih dari 65 tahun sebanyak 3% atau 3 orang.

Adapun responden di Kota Semarang didominasi oleh masyarakat remaja akhir dengan rentang usia 17 – 25 sebesar 34%, atau 34 orang. Sementara itu, masyarakat dewasa akhir dengan rentang usia 36 - 45 tahun menjadi yang terbanyak kedua dengan jumlah 18% atau 18 orang, diikuti dengan masyarakat lansia awal pada rentang usia 46 - 55 tahun sebanyak 16% atau 16 orang, masyarakat dewasa awal pada rentang usia 26 – 35 sebanyak 13% atau 13 orang, masyarakat lansia akhir pada rentang usia 56 - 65 tahun sebanyak 11% atau 11 orang, serta masyarakat manula berusia lebih dari 65 tahun sebanyak 8% atau 8 orang.

3.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pengklasifikasian karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dimaksudkan untuk menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat intelektualitas responden. Biasanya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, maka semakin tinggi pula intelektualitas yang dimiliki seseorang. Kecerdasan dapat terbentuk karena proses pembelajaran dan lingkungan belajar yang baik. Dari kecerdasan inilah yang memungkinkan adanya perbedaan cara pandang seseorang dalam menyikapi dan mempersepsikan suatu hal.

Dalam penelitian ini, tidak ada kriteria khusus mengenai tingkat pendidikan masyarakat untuk menjadi responden. Masyarakat yang tidak sekolah hingga masyarakat lulusan perguruan tinggi bisa menjadi responden. Untuk itu, responden pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi tujuh tingkat pendidikan, mulai dari tidak

sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP/SLTP), sekolah menengah atas (SMA/SMK/SLTA), diploma (D1/D2/D3/D4), sarjana (S1), hingga pasca sarjana (S2/S3). Berikut data identitas responden di Kota Solo dan Kota Semarang berdasarkan pendidikan terakhirnya:

Tabel 3. 3 Identitas Responden di Kota Solo dan Kota Semarang Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kota Solo			Kota Semarang		
Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Sekolah	2	2	Tidak Sekolah	2	2
SD	8	8	SD	3	3
SMP/SLTP	19	19	SMP/SLTP	10	10
SMA/SLTA	48	48	SMA/SLTA	51	51
Diploma (D1/D2/D3/D4)	6	6	Diploma (D1/D2/D3/D4)	4	4
Sarjana (S1)	17	17	Sarjana (S1)	29	29
Pasca Sarjana (S2/S3)	0	0	Pasca Sarjana (S2/S3)	1	1
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Identitas Responden

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden di Kota Solo didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SLTA sebesar 48%, atau 48 orang. Jumlah ini menjadi yang terbanyak diikuti dengan responden dengan pendidikan terakhir SMP/SLTP sebesar 19% atau 19 orang, responden dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebesar 17% atau 17 orang, responden dengan tingkat pendidikan SD sebesar 8% atau 8 orang, responden dengan tingkat pendidikan Diploma (D1/D2/D3/D4) sebesar 6% atau 6 orang, hingga responden yang tidak sekolah sebesar 2% atau 2 orang. Sementara itu, responden dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana, baik itu lulusan S2 ataupun S3 menjadi yang paling sedikit pada penelitian ini, yakni sebesar 0%, yang berarti tidak satu orangpun yang menjadi bagian dari responden.

Rendahnya responden dengan tingkat pendidikan terakhir Pasca Sarjana di Kota Solo turut dipengaruhi oleh fakta bahwa hanya ada 4.713 dari 526.870 penduduk di Kota Solo yang memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang ini. Berdasarkan data dari BPS Kota Surakarta, pada tahun 2024 hanya ada 0,85% masyarakat Kota Solo yang menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Magister (S2), serta 0,04% masyarakat Kota Solo yang menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Doktoral (S3). Fakta tersebut tentu berpengaruh pada pola pikir dalam menentukan pandangan dan sikap masyarakat Kota Solo terhadap politik dinasti Presiden Jokowi.

Adapun responden di Kota Semarang didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SLTA sebesar 51%, atau 51 orang. Jumlah ini menjadi yang terbanyak diikuti dengan responden dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebesar 29% atau 29 orang, responden dengan tingkat SMP/SLTP sebesar 10% atau 10 orang, responden dengan tingkat pendidikan Diploma (D1/D2/D3/D4) sebesar 4% atau 4 orang, responden dengan tingkat pendidikan SD sebesar 3% atau 3 orang, hingga responden yang tidak sekolah sebesar 2% atau 2 orang. Sementara itu, responden dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana, baik itu lulusan S2 ataupun S3 menjadi yang paling sedikit pada penelitian ini, yakni sebesar 1%, yang berarti hanya ada 1 masyarakat yang menjadi bagian dari responden.

Tingginya responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA di Kota Semarang turut dipengaruhi oleh fakta bahwa ada 685.184 dari 1.694.743 penduduk di Kota Semarang yang memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang ini. Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang pada tahun 2024, jumlah ini jadi yang terbanyak di Kota Semarang dengan persentase mencapai 40,43%.

Fakta tersebut tentu berpengaruh pada pola pikir dan sikap masyarakat Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi.

3.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

Pengklasifikasian responden berdasarkan pekerjaan utama dimaksudkan untuk memahami pola pikir dan sudut pandang setiap responden yang dipengaruhi oleh resiko pekerjaan, tingkat stres, dan tingkat penghasilan yang beragam. Dalam penelitian ini, pekerjaan utama responden diklasifikasi menjadi tujuh jenis pekerjaan mulai dari PNS, TNI/Polri, pedagang, pegawai swasta, pelajar/mahasiswa, wiraswasta, hingga pekerjaan lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi pekerjaan utama. Berikut data identitas responden di Kota Solo dan Kota Semarang berdasarkan pekerjaan utamanya:

Tabel 3. 4 Identitas Responden di Kota Solo dan Kota Semarang Berdasarkan Pekerjaan Utama

Kota Solo			Kota Semarang		
Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
PNS	5	5	PNS	0	0
TNI/Polri	1	1	TNI/Polri	0	0
Pedagang	3	3	Pedagang	7	7
Pegawai Swasta	27	27	Pegawai Swasta	36	36
Pelajar/Mahasiswa	15	15	Pelajar/Mahasiswa	12	12
Wiraswasta	25	25	Wiraswasta	22	22
Lainnya	24	24	Lainnya	23	23
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Identitas Responden

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden di Kota Solo didominasi oleh masyarakat dengan pekerjaan utama sebagai pegawai swasta dan wiraswasta, dimana masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan oleh 27% dan 25% responden di Kota Solo. Sementara itu, TNI/Polri dan PNS menjadi

pekerjaan utama yang paling sedikit dilakukan oleh responden di Kota Solo dengan jumlah 1% dan 5% dari seluruh responden.

Adapun responden di Kota Semarang didominasi oleh masyarakat dengan pekerjaan utama sebagai pegawai swasta dan lainnya, dimana masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan oleh 36% dan 23% responden di Kota Semarang. Sementara itu, masyarakat dengan pekerjaan utama PNS dan TNI/Polri menjadi pekerjaan utama yang paling sedikit dilakukan oleh responden di Kota Semarang, dimana masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan oleh 0% responden di Kota Semarang, yang berarti tidak ada satu orangpun responden penelitian di Kota Semarang yang bekerja sebagai PNS dan TNI/Polri.

3.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi

Fenomena mengenai politik dinasti Presiden Jokowi tidak lepas dari pro dan kontra yang kemudian menimbulkan sebuah persepsi tertentu. Dalam hal ini, untuk dapat menjelaskan persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi, digunakan 3 (tiga) indikator yaitu indikator kognitif, afektif, dan juga evaluatif. Ketiga indikator tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 30 item pertanyaan yang diajukan kepada para responden, dimana pertanyaan tersebut terdiri dari 9 pertanyaan kognitif, 14 pertanyaan afektif, dan juga 7 pertanyaan evaluatif.

3.2.1 Aspek Kognitif (Pengetahuan)

Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan individu mengenai apa yang benar bagi objek yang dipersepsikan. Dalam penelitian ini, aspek kognitif masyarakat terhadap politik dinasti Presiden Jokowi dijelaskan sebagai suatu pandangan dan cara berpikir masyarakat mengenai sejauh mana pengetahuan mereka terhadap politik dinasti Presiden Jokowi.

1) Pengetahuan Masyarakat Mengenai Istilah Politik Dinasti

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang terkait dalam hubungan keluarga, baik antara orangtua dengan anaknya, suami dengan istrinya, maupun kakak dengan adiknya, dengan maksud untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Karakteristik utama dari politik dinasti adalah adanya keberadaan pemimpin awal yang memiliki kharisma dan legitimasi yang kuat, serta adanya pewarisan kekuasaan yang terjadi secara turun-temurun dalam satu garis keluarga. Pengetahuan masyarakat terhadap politik dinasti menjadi pondasi penting sebelum mereka dapat mempersepsikan politik dinasti Presiden Jokowi. Berikut tabel data mengenai pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap istilah politik dinasti:

Tabel 3. 5 Pengetahuan Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Istilah Politik Dinasti

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Tahu Sama Sekali	0	0	Tidak Tahu Sama Sekali	0	0
Tidak Tahu	0	0	Tidak Tahu	0	0
Kurang Tahu	0	0	Kurang Tahu	1	1
Tahu	69	69	Tahu	71	71
Sangat Tahu	31	31	Sangat Tahu	28	28
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Kognitif 1

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 69 responden di Kota Solo (69%) mengetahui istilah politik dinasti. Sementara

itu, sejumlah 31 responden di Kota Solo (31%) mempersepsikan sangat tahu, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan tidak tahu sama sekali, tidak tahu, dan kurang tahu mengenai istilah politik dinasti.

Adapun sejumlah 71 responden di Kota Semarang (71%) mengetahui istilah politik dinasti. Sementara itu, sejumlah 28 responden di Kota Semarang (28%) mempersepsikan sangat tahu, 1 responden di Kota Semarang (1%) mempersepsikan kurang tahu, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan tidak tahu sama sekali, dan tidak tahu mengenai istilah politik dinasti.

Pertanyaan pertama pada aspek kognitif mendapatkan mayoritas jawaban tahu dengan nilai mean sebesar 4,31 di Kota Solo dan 4,27 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban tidak tahu sama sekali 1 poin, tidak tahu 2 poin, kurang tahu 3 poin, tahu 4 poin, dan sangat tahu 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengetahui bahwa politik dinasti adalah istilah yang merujuk pada sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh keluarga, dengan maksud untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang dimiliki.

Istilah mengenai politik dinasti bukan merupakan sesuatu yang baru. Sebelum dikaitkan dengan Presiden Jokowi, politik dinasti telah menjadi fenomena yang ada sejak era kerajaan dan terus berkembang hingga era modern. Pada era modern, politik dinasti seringkali dipandang sebagai penghambat kemajuan demokrasi, karena praktik ini cenderung mengabaikan prinsip meritokrasi, di mana kesempatan untuk memimpin

lebih didasarkan pada hubungan keluarga daripada kemampuan dan prestasi. Fenomena ini umumnya terjadi para figur-figur politik dengan kharisma dan legitimasi yang kuat seperti Soekarno dan Soeharto di tingkat nasional, hingga Ratu Atut dan berbagai pejabat lain di tingkat daerah. Atas dasar inilah mengapa kemudian banyak masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang yang sudah mengetahui istilah politik dinasti Presiden Jokowi.

2) Sumber Pengetahuan Masyarakat Mengenai Istilah Politik Dinasti

Pengetahuan masyarakat mengenai istilah politik dinasti memiliki sumber yang beragam, mulai dari televisi, media sosial, berita online, koran, hingga buku. Berbagai sumber ini memberikan referensi yang berbeda-beda kepada masyarakat, sehingga memungkinkan adanya perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai istilah politik dinasti. Berikut tabel data mengenai sumber pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap istilah politik dinasti:

Tabel 3. 6 Sumber Pengetahuan Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Istilah Politik Dinasti

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Televisi	26	26	Televisi	20	20
Media Sosial	47	47	Media Sosial	65	65
Berita Online	23	23	Berita Online	9	9
Koran	3	3	Koran	2	2
Buku	1	1	Buku	4	4
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Kognitif 2

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 47 responden di Kota Solo (47%) memperoleh pengetahuan mengenai politik dinasti dari

media sosial, baik itu yang berasal dari *Whatsapp, Instagram, TikTok, Youtube, Facebook*, hingga *Twitter*. Sementara itu, sejumlah 26 responden (26%) memperoleh pengetahuan mengenai politik dinasti dari televisi, 23 responden (23%) memperoleh pengetahuan mengenai politik dinasti dari berita online, 3 responden (3%) memperoleh pengetahuan mengenai politik dinasti dari koran, dan 1 responden (1%) memperoleh pengetahuan mengenai politik dinasti dari buku.

Adapun sejumlah 65 responden di Kota Semarang (65%) memperoleh pengetahuan mengenai politik dinasti dari media sosial, baik itu yang berasal dari *Whatsapp, Instagram, TikTok, Youtube, Facebook*, hingga *Twitter*. Sementara itu, sejumlah 20 responden (20%) memperoleh pengetahuan mengenai politik dinasti dari televisi, 9 responden (9%) memperoleh pengetahuan mengenai politik dinasti dari berita online, 2 responden (2%) memperoleh pengetahuan mengenai politik dinasti dari koran, dan 4 responden (4%) memperoleh pengetahuan mengenai politik dinasti dari buku.

Pertanyaan kedua pada aspek kognitif mendapatkan mayoritas jawaban media sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengetahui istilah politik dinasti dari media sosial. Saat ini, media sosial telah menjadi sumber informasi yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari remaja, dewasa, hingga orangtua. Fleksibilitas dan kemudahan yang ditawarkan berbagai platform media sosial telah menggeser sarana informasi lain yang sudah lebih dahulu eksis seperti televisi, berita online, koran hingga buku. Atas dasar inilah mengapa kemudian banyak masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang yang memperoleh pengetahuan mengenai istilah politik dinasti dari media sosial. Meski begitu, penggunaan media sosial sebagai sarana informasi tetap harus difilter, karena

tidak semua informasi yang berasal dari media sosial dapat dipertanggung jawabkan.

3) Pengetahuan Masyarakat Mengenai Gibran yang Pernah Menjabat Sebagai Walikota Solo Periode 2021-2024

Gibran Rakabuming Raka adalah putra pertama dari Presiden Jokowi yang merupakan Walikota Solo periode 2005-2010 dan 2010-2012. Sejak dulu, Presiden Jokowi dikenal memiliki citra sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat, sehingga dengan citra inilah Presiden Jokowi mendapatkan kharisma dan legitimasi yang kuat di tengah masyarakat Kota Solo. Pada Pilkada Solo 2020, Gibran berhasil terpilih sebagai Walikota Solo periode 2021-2024. Melalui jabatan inilah Gibran mencoba mengawali karirnya di dunia politik, sama seperti yang dilakukan Presiden Jokowi dulu. Berikut adalah tabel data yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai Gibran yang pernah menjabat sebagai Walikota Solo periode 2021-2024:

Tabel 3. 7 Pengetahuan Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Gibran yang Pernah Menjabat Sebagai Walikota Solo Periode 2021-2024

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Tahu Sama Sekali	0	0	Tidak Tahu Sama Sekali	0	0
Tidak Tahu	0	0	Tidak Tahu	0	0
Kurang Tahu	0	0	Kurang Tahu	1	1
Tahu	69	69	Tahu	79	79
Sangat Tahu	31	31	Sangat Tahu	20	20
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Kognitif 3

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 69 responden di Kota Solo (69%) mengetahui bahwa Gibran pernah menjabat sebagai Walikota Solo periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 31 responden (31%) mempersepsikan sangat tahu, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan tidak tahu sama sekali, tidak tahu, dan kurang tahu mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 79 responden di Kota Semarang (79%) mengetahui bahwa Gibran pernah menjabat sebagai Walikota Solo periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 20 responden (20%) mempersepsikan sangat tahu, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan tidak tahu sama sekali, tidak tahu, dan kurang tahu mengenai hal ini.

Pertanyaan ketiga pada aspek kognitif mendapatkan mayoritas jawaban tahu dengan nilai mean sebesar 4,31 di Kota Solo dan 4,19 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban tidak tahu sama sekali 1 poin, tidak tahu 2 poin, kurang tahu 3 poin, tahu 4 poin, dan sangat tahu 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengetahui bahwa Gibran sebagai putra pertama Presiden Jokowi pernah menjabat sebagai Walikota Solo periode 2021-2024.

4) Pengetahuan Masyarakat Mengenai Gibran yang Terpilih Sebagai Wakil Presiden Periode 2024-2029

Pada akhir tahun 2023, Gibran yang masih aktif menjabat sebagai Walikota Solo diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada Pilpres

2024. Saat itu, banyak pihak yang menilai bahwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dipenuhi dengan problematika, mulai dari usianya yang bertentangan dengan regulasi pemilu, hingga pengalamannya di bidang politik yang masih sangat minim. Meski diwarnai berbagai masalah, Gibran berhasil terpilih sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dengan memperoleh 96.214.691 dari 164.227.475 suara sah. Berikut adalah tabel data yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai Gibran yang terpilih sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029:

Tabel 3. 8 Pengetahuan Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Gibran yang Terpilih Sebagai Wakil Presiden Periode 2024-2029

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Tahu Sama Sekali	0	0	Tidak Tahu Sama Sekali	0	0
Tidak Tahu	0	0	Tidak Tahu	1	1
Kurang Tahu	0	0	Kurang Tahu	5	5
Tahu	69	69	Tahu	81	81
Sangat Tahu	31	31	Sangat Tahu	13	13
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Kognitif 4

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 69 responden di Kota Solo (69%) mengetahui bahwa Gibran terpilih sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. Sementara itu, sejumlah 31 responden (31%) mempersepsikan sangat tahu, dan tidak ada satupun responden yang

mempersepsikan tidak tahu sama sekali, tidak tahu, dan kurang tahu mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 81 responden di Kota Semarang (81%) mengetahui bahwa Gibran terpilih sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. Sementara itu, sejumlah 13 responden (13%) mempersepsikan sangat tahu, 5 responden mempersepsikan kurang tahu, 1 responden (1%) mempersepsikan tidak tahu, dan tidak ada satupun responden mempersepsikan tidak tahu sama sekali mengenai hal ini.

Pertanyaan keempat pada aspek kognitif mendapatkan mayoritas jawaban tahu dengan nilai mean sebesar 4,31 di Kota Solo dan 4,06 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban tidak tahu sama sekali 1 poin, tidak tahu 2 poin, kurang tahu 3 poin, tahu 4 poin, dan sangat tahu 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengetahui bahwa Gibran sebagai putra pertama Presiden Jokowi terpilih sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.

5) Pengetahuan Masyarakat Mengenai Bobby Nasution yang Pernah Menjabat Sebagai Walikota Medan Periode 2021-2024

Bobby Nasution adalah suami dari Kahiyang Ayu yang merupakan putri kedua dari Presiden Jokowi. Sama seperti Gibran, Bobby memutuskan untuk terjun ke dunia politik mengikuti jejak mertuanya dengan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Medan pada Pilkada 2020. Alasan Bobby untuk maju di Kota Medan karena dirinya berasal dari keluarga Batak Mandailing yang lahir dan besar di Kota Medan. Saat itu, Bobby yang diusung oleh PDI Perjuangan

berhasil memenangkan Pilkada dan menjadikannya sebagai Walikota Medan periode 2021-2024. Berikut adalah tabel data yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai Bobby Nasution yang pernah menjabat sebagai Walikota Medan periode 2021-2024:

Tabel 3. 9 Pengetahuan Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Bobby Nasution yang Pernah Menjabat Sebagai Walikota Medan Periode 2021-2024

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Tahu Sama Sekali	1	1	Tidak Tahu Sama Sekali	0	0
Tidak Tahu	1	1	Tidak Tahu	0	0
Kurang Tahu	6	6	Kurang Tahu	1	1
Tahu	78	78	Tahu	80	80
Sangat Tahu	14	14	Sangat Tahu	19	19
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Kognitif 5

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 78 responden di Kota Solo (78%) mengetahui bahwa Bobby Nasution pernah menjabat sebagai Walikota Medan periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 14 responden (14%) mempersepsikan sangat tahu, 6 responden (6%) mempersepsikan kurang tahu, dan masing-masing 1 responden (1%) mempersepsikan tidak tahu dan tidak tahu sama sekali mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 80 responden di Kota Semarang (80%) mengetahui bahwa Bobby Nasution pernah menjabat sebagai Walikota Medan periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 19 responden (19%) mempersepsikan sangat tahu, 1 responden (1%) mempersepsikan kurang tahu, dan tidak ada

satupun responden yang mempersepsikan tidak tahu dan tidak tahu sama sekali mengenai hal ini.

Pertanyaan kelima pada aspek kognitif mendapatkan mayoritas jawaban tahu dengan nilai mean sebesar 4,03 di Kota Solo dan 4,18 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban tidak tahu sama sekali 1 poin, tidak tahu 2 poin, kurang tahu 3 poin, tahu 4 poin, dan sangat tahu 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengetahui bahwa Bobby Nasution sebagai menantu Presiden Jokowi pernah menjabat sebagai Walikota Medan periode 2021-2024.

6) Pengetahuan Masyarakat Mengenai Bobby Nasution yang Mencalonkan Diri Sebagai Gubernur Sumatera Utara Pada Pilkada 2024

Pada pertengahan tahun 2024, Bobby Nasution mendapatkan dukungan dari Golkar, Gerindra, dan partai anggota KIM Plus untuk berkontestasi pada Pilkada Sumatera Utara 2024. Kabar mengenai majunya Bobby pada Pilkada Sumatera Utara tidak hanya diketahui oleh masyarakat di wilayah Sumatera Utara saja, melainkan juga telah menjadi sorotan nasional mengingat statusnya sebagai menantu Presiden Jokowi yang merupakan Presiden ketujuh RI. Berikut adalah tabel data yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai Bobby Nasution yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024:

Tabel 3. 10 Pengetahuan Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Bobby Nasution yang Mencalonkan Diri Sebagai Gubernur Sumatera Utara Pada Pilkada 2024

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Tahu Sama Sekali	1	1	Tidak Tahu Sama Sekali	0	0
Tidak Tahu	1	1	Tidak Tahu	1	1
Kurang Tahu	6	6	Kurang Tahu	6	6
Tahu	78	78	Tahu	79	79
Sangat Tahu	14	14	Sangat Tahu	14	14
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Kognitif 6

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 78 responden di Kota Solo (78%) mengetahui bahwa Bobby Nasution mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Sementara itu, sejumlah 14 responden (14%) mempersepsikan sangat tahu, 6 responden (6%) mempersepsikan kurang tahu, dan masing-masing 1 responden (1%) mempersepsikan tidak tahu dan tidak tahu sama sekali mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 79 responden di Kota Semarang (79%) mengetahui bahwa Bobby Nasution mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Sementara itu, sejumlah 14 responden (14%) mempersepsikan sangat tahu, 6 responden (6%) mempersepsikan kurang tahu, 1 responden (1%) mempersepsikan tidak tahu, dan tidak ada responden yang mempersepsikan tahu sama sekali mengenai hal ini.

Pertanyaan keenam pada aspek kognitif mendapatkan mayoritas jawaban tahu dengan nilai mean sebesar 4,03 di Kota Solo dan 4,06 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban tidak tahu sama sekali 1 poin, tidak tahu 2 poin, kurang tahu 3 poin, tahu 4 poin, dan sangat tahu 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengetahui bahwa Bobby Nasution sebagai menantu Presiden Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024.

7) Pengetahuan Masyarakat Mengenai Kaesang yang Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Periode 2023-2028

Kaesang adalah putra ketiga dari Presiden Jokowi yang merupakan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sejak dulu, Kaesang dikenal cukup aktif di berbagai media sosial, sehingga banyak dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 25 September 2023, Kaesang mencoba mengawali karir politiknya dengan bergabung sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pada saat itu, ia langsung ditunjuk sebagai ketua umum partai menggantikan Giring Ganesha yang sebelumnya menjabat pada periode 2019-2023. Berikut adalah tabel data yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai Kaesang yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028:

**Tabel 3. 11 Pengetahuan Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang
Mengenai Kaesang yang Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai
Solidaritas Indonesia Periode 2023-2028**

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Tahu Sama Sekali	0	0	Tidak Tahu Sama Sekali	0	0
Tidak Tahu	0	0	Tidak Tahu	0	0
Kurang Tahu	1	1	Kurang Tahu	0	0
Tahu	80	80	Tahu	69	69
Sangat Tahu	19	19	Sangat Tahu	31	31
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Kognitif 7

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 80 responden di Kota Solo (80%) mengetahui bahwa Kaesang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2023-2028. Sementara itu, sejumlah 19 responden (19%) mempersepsikan sangat tahu, 1 responden (1%) mempersepsikan kurang tahu, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan tidak tahu sama sekali dan tidak tahu mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 69 responden di Kota Semarang (69%) mengetahui bahwa Kaesang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2023-2028. Sementara itu, sejumlah 31 responden (31%) mempersepsikan sangat tahu, dan tidak ada satu orangpun responden yang mempersepsikan tidak tahu sama sekali, tidak tahu, dan kurang tahu mengenai hal ini.

Pertanyaan ketujuh pada aspek kognitif mendapatkan mayoritas jawaban tahu dengan nilai mean sebesar 4,18 di Kota Solo dan 4,31 di Kota Semarang

yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban tidak tahu sama sekali 1 poin, tidak tahu 2 poin, kurang tahu 3 poin, tahu 4 poin, dan sangat tahu 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengetahui bahwa Kaesang sebagai putra ketiga Presiden Jokowi saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI periode 2023-2028.

8) Pengetahuan Masyarakat Mengenai Bagaskara Ikhlasulla Arif yang Menjabat Sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero)

Bagaskara Ikhlasulla Arif adalah putra dari Titik Relawati, dimana Titik adalah adik bungsu dari Presiden Jokowi. Sebagai keponakan Presiden Jokowi, Bagaskara memilih jalan karir yang berbeda dari paman dan sepupu-sepupunya, dengan lebih memilih berkarir di perusahaan BUMN dibandingkan menempati jabatan-jabatan politik. Berikut adalah tabel data yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai Bagaskara Ikhlasulla Arif yang menjabat sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero):

Tabel 3. 12 Pengetahuan Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Bagaskara Ikhlasulla Arif yang Menjabat Sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero)

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Tahu Sama Sekali	1	1	Tidak Tahu Sama Sekali	1	1
Tidak Tahu	8	8	Tidak Tahu	11	11
Kurang Tahu	33	33	Kurang Tahu	32	32
Tahu	46	46	Tahu	46	46
Sangat Tahu	12	12	Sangat Tahu	10	10
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Kognitif 8

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 46 responden di Kota Solo (46%) mengetahui bahwa Bagaskara Ikhlasulla Arif saat ini menjabat sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero). Sementara itu, sejumlah 33 responden (33%) mempersepsikan kurang tahu, 12 responden (12%) mempersepsikan sangat tahu, 8 responden (8%) mempersepsikan tidak tahu, dan 1 responden (1%) mempersepsikan tidak tahu sama sekali mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 46 responden di Kota Semarang (46%) mengetahui bahwa Bagaskara Ikhlasulla Arif saat ini menjabat sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero). Sementara itu, sejumlah 32 responden (32%) mempersepsikan kurang tahu, 11 responden (11%) mempersepsikan tidak tahu, 10 responden (10%) mempersepsikan sangat tahu, dan 1 responden (1%) mempersepsikan tidak tahu sama sekali mengenai hal ini.

Pertanyaan kedelapan pada aspek kognitif mendapatkan mayoritas jawaban tahu dengan nilai mean sebesar 3,60 di Kota Solo dan 3,53 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban tidak tahu sama sekali 1 poin, tidak tahu 2 poin, kurang tahu 3 poin, tahu 4 poin, dan sangat tahu 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengetahui bahwa Bagaskara yang merupakan keponakan Presiden Jokowi saat ini menjabat sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero).

9) Pengetahuan Masyarakat Mengenai Anwar Usman yang Pernah Menjabat Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2018-2023

Anwar Usman adalah suami dari Idayati, adik dari Joko Widodo sekaligus tokoh hukum Indonesia yang telah malang melintang sebagai hakim pada

berbagai lembaga yudikatif. Pada tahun 2018, Anwar Usman resmi diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2023, Anwar Usman harus diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi setelah mengabulkan gugatan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Berikut adalah tabel data yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai Anwar Usman yang pernah menjabat Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023:

Tabel 3. 13 Pengetahuan Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Anwar Usman yang Pernah Menjabat Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2018-2023

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Tahu Sama Sekali	1	1	Tidak Tahu Sama Sekali	1	1
Tidak Tahu	8	8	Tidak Tahu	8	8
Kurang Tahu	17	17	Kurang Tahu	16	16
Tahu	60	60	Tahu	61	61
Sangat Tahu	14	14	Sangat Tahu	14	14
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Kognitif 9

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 60 responden di Kota Solo (60%) mengetahui bahwa Anwar Usman pernah menjabat Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023. Sementara itu, sejumlah 17 responden (17%) mempersepsikan kurang tahu, 14 responden (14%) mempersepsikan sangat tahu, 8 responden (8%)

mempersepsikan tidak tahu, dan 1 responden (1%) mempersepsikan tidak tahu sama sekali mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 61 responden di Kota Semarang (61%) mengetahui bahwa Anwar Usman pernah menjabat Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023. Sementara itu, sejumlah 16 responden (16%) mempersepsikan kurang tahu, 14 responden (14%) mempersepsikan sangat tahu, 8 responden (8%) mempersepsikan tidak tahu, dan 1 responden (1%) mempersepsikan tidak tahu sama sekali mengenai hal ini.

Pertanyaan kesembilan pada aspek kognitif mendapatkan mayoritas jawaban tahu dengan nilai mean sebesar 3,78 di Kota Solo dan 3,79 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban tidak tahu sama sekali 1 poin, tidak tahu 2 poin, kurang tahu 3 poin, tahu 4 poin, dan sangat tahu 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengetahui bahwa Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi pernah menjabat Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023.

Perlu diketahui, sebelum menikah dengan Idayati, Anwar Usman adalah seorang duda dengan tiga anak, setelah istrinya yang bernama Suhada Ahmad Sidik meninggal dunia pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Anwar usman menikah dengan Idayati dan resmi menjadi bagian dari keluarga besar Presiden Jokowi. Nama Anwar Usman mulai banyak dibicarakan setelah adanya kontroversi mengenai hasil sidang putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat itu, Anwar Usman yang menjabat

sebagai Ketua MK memutuskan bahwa batas usia minimal untuk menjadi calon wakil presiden adalah 40 tahun, atau setidaknya sudah pernah menjadi menempati jabatan publik. Putusan ini membuat langkah keponakannya Gibran dapat maju pada Pilpres 2024.

10) Rekapitulasi Jawaban Kognitif Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi, dilakukan rekapitulasi jawaban pada indikator kognitif. Rekapitulasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi, dengan meninjau jawaban yang paling dominan dari 8 (delapan) instrumen pertanyaan. Berikut adalah tabel data yang menunjukkan rekapitulasi persentase jawaban kognitif masyarakat terhadap politik dinasti Presiden Jokowi:

Tabel 3. 14 Rekapitulasi Jawaban Kognitif Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi

	Kota Solo					Kota Semarang				
	Tidak Tahu Sama Sekali	Tidak Tahu	Kurang Tahu	Tahu	Sangat Tahu	Tidak Tahu Sama Sekali	Tidak Tahu	Kurang Tahu	Tahu	Sangat Tahu
P1	0	0	0	69	31	0	0	1	71	28
P2	0	0	0	69	31	0	0	1	79	20
P3	0	0	0	69	31	0	1	5	81	13
P4	1	1	6	78	14	0	0	1	80	19
P5	1	1	6	78	14	0	1	6	79	14
P6	0	0	1	80	19	0	0	0	69	31
P7	1	8	33	46	12	1	11	32	46	10
P8	1	8	17	60	14	1	8	16	61	14

Sumber: Olahan Data Peneliti, Rekapitulasi Kognitif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban “tahu” pada instrumen pertanyaan keenam menjadi jawaban yang paling dominan dalam aspek kognitif masyarakat Kota Solo. Instrumen pertanyaan keenam pada penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat mengenai Kaesang yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028. Total ada 80 dari 100 responden di Kota Solo yang memberikan jawaban “tahu” pada pertanyaan ini.

Sementara itu, jawaban yang paling dominan dalam aspek kognitif masyarakat Kota Semarang adalah jawaban “tahu” pada instrumen pertanyaan ketiga. Instrumen pertanyaan ketiga pada penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat mengenai Gibran yang terpilih sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. Total ada 81 dari 100 responden di Kota Semarang yang memberikan jawaban “tahu” pada pertanyaan ini.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di kedua kota memiliki pengetahuan yang baik terhadap keterlibatan keluarga Presiden Jokowi dalam dunia politik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan anggota keluarga Presiden Jokowi yang menempati posisi strategis dalam partai politik maupun pemerintahan sudah menjadi bagian dari isu yang dikenal dan diperhatikan oleh masyarakat.

11) Nilai Kognitif Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi

Untuk dapat mengidentifikasi tingkat kognitif pada persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi, maka interpretasi dilakukan dengan teknik analisa statistik deskriptif. Skor keseluruhan persepsi masyarakat pada indikator kognitif dapat diperoleh melalui perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

**Jumlah Skor Seluruh Kriteria = Jumlah Skor Tiap Kriteria X Jumlah
Responden X Instrumen Pertanyaan**

Setiap kriteria jawaban memiliki poin skor yang beragam, dimana pada aspek kognitif poin yang diperoleh untuk jawaban tidak tahu sama sekali 1 poin, tidak tahu 2 poin, kurang tahu 3 poin, tahu 4 poin, dan sangat tahu 5 poin. Adapun jumlah responden untuk penelitian di Kota Solo dan Kota Semarang adalah 100 orang dengan jumlah instrumen pertanyaan sebanyak 8 butir, diluar dari pertanyaan nomor dua yang tidak memiliki kriteria skor jawaban. Berikut adalah jumlah skor untuk setiap kriteria jawaban pada aspek kognitif:

- Tidak Tahu Sama Sekali = $1 \times 100 \times 8 = 800$
- Tidak Tahu = $2 \times 100 \times 8 = 1.600$
- Kurang Tahu = $3 \times 100 \times 8 = 2.400$
- Tahu = $4 \times 100 \times 8 = 3.200$
- Sangat Tahu = $5 \times 100 \times 8 = 4.000$

Pada indikator kognitif, skor paling tinggi atau skor ideal yang bisa dicapai adalah 4.000, sedangkan skor yang paling rendah yang bisa dicapai adalah 800. Jumlah ini diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus jumlah skor seluruh kriteria sebagaimana yang tercantum diatas. Adapun interpretasi nilai pada indikator kognitif adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Tabel Interval Indikator Kognitif

Interval	Kategori
800 - 1.866	Rendah
1.867 - 2.933	Sedang
2.934 - 4.000	Tinggi

Sumber: Olahan Data Peneliti, Interval Kognitif

Pada indikator kognitif, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengukuran menggunakan skala likert, dimana rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data Tingkat Kognitif Masyarakat} = \frac{\text{Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data}}{\text{Jumlah Skor Ideal (Tertinggi)}} \times 100\%$$

Selanjutnya, kriteria interpretasi rekapitulasi skor tingkat kognitif masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Tabel Interpretasi Indikator Kognitif

Interval	Kategori
20% - 46,6%	Rendah
46,7% - 73,3%	Sedang
73,4% - 100%	Tinggi

Sumber: Olahan Data Peneliti, Interpretasi Kognitif

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, jumlah skor hasil pengumpulan data tingkat kognitif masyarakat di Kota Solo mencapai 3.255, atau setara dengan 81,38%. Sementara itu, jumlah skor hasil pengumpulan data tingkat kognitif masyarakat di Kota Semarang adalah 3.239, atau setara dengan 80,97%. Dengan perolehan angka tersebut, interpretasi pengetahuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi termasuk ke dalam kategori tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai politik dinasti Presiden Jokowi. Pengetahuan tersebut mencakup pemahaman tentang istilah politik dinasti, serta aktivitas dan jabatan politik yang dimiliki oleh anggota keluarga Presiden Jokowi. Tingginya tingkat pengetahuan

masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi turut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti paparan informasi melalui media massa, aktivitas politik yang melibatkan anggota keluarga Presiden Jokowi, serta perhatian publik terhadap jabatan strategis yang mereka miliki.

3.2.2 Aspek Afektif (Perasaan)

Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan yang menyangkut sisi emosional subjektif suatu individu terhadap objek yang dipersepsikan. Dalam penelitian ini, aspek afektif erat kaitannya dengan sudut pandang masyarakat terhadap baik atau tidaknya maupun setuju atau tidaknya dengan politik dinasti Presiden Jokowi.

1) Pendapat Masyarakat Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi

Di era saat ini, politik dinasti seringkali dipandang sebagai penghambat kemajuan demokrasi. Sebagian besar pengamat politik memandang bahwa praktik politik dinasti berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, dimana sumber daya negara dan fasilitas pemerintahan dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarga. Meski sering dipandang dalam konotasi negatif, ada sebagian kalangan yang melihat fenomena politik dinasti dari sisi sebaliknya. Bagi sebagian kalangan, politik dinasti dapat dipandang sebagai langkah yang tepat dalam meningkatkan stabilitas dan kesinambungan dalam pemerintahan. Berikut tabel data pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai politik dinasti Presiden Jokowi:

**Tabel 3. 17 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang
Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi**

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	8	8	Sangat Tidak Setuju	15	15
Tidak Setuju	38	38	Tidak Setuju	48	48
Kurang Setuju	25	25	Kurang Setuju	31	31
Setuju	25	25	Setuju	6	6
Sangat Setuju	4	4	Sangat Setuju	0	0
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 1

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 38 responden di Kota Solo (38%) tidak setuju dengan adanya politik dinasti Presiden Jokowi. Sementara itu, masing-masing sejumlah 25 responden (25%) mempersepsikan kurang setuju dan setuju, 8 responden (8%) mempersepsikan sangat tidak setuju, dan 4 responden (4%) mempersepsikan sangat setuju dengan adanya politik dinasti Presiden Jokowi.

Adapun sejumlah 48 responden di Kota Semarang (48%) tidak setuju dengan adanya politik dinasti Presiden Jokowi. Sementara itu, sejumlah 31 responden (31%) mempersepsikan kurang setuju, 15 responden (15%) mempersepsikan sangat tidak setuju, 6 responden (6%) mempersepsikan setuju, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat setuju dengan adanya politik dinasti Presiden Jokowi.

Pertanyaan pertama pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban tidak setuju dengan nilai mean sebesar 2,79 di Kota Solo dan 2,28 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing

wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak setuju 1 poin, tidak setuju 2 poin, kurang setuju 3 poin, setuju 4 poin, dan sangat setuju 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang tidak setuju dengan adanya politik dinasti Presiden Jokowi.

2) Pendapat Masyarakat Mengenai Terpilihnya Gibran Sebagai Walikota Solo Periode 2021-2024

Pada tahun 2020, Gibran mencoba peruntungannya di dunia politik dengan mengikuti kontestasi Pilkada Solo. Saat itu, Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa diusung oleh PDI Perjuangan dan berhadapan dengan pasangan Bagyo Wahyono - Suparjo Fransiskus Xaverius yang merupakan calon independen. Hasilnya, pasangan Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakosa berhasil menang dengan memperoleh 86,5% suara. Berikut tabel data pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai terpilihnya Gibran sebagai Walikota Solo periode 2021-2024:

Tabel 3. 18 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Terpilihnya Gibran Sebagai Walikota Solo Periode 2021-2024

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	2	2	Sangat Tidak Setuju	7	7
Tidak Setuju	6	6	Tidak Setuju	17	17
Kurang Setuju	27	27	Kurang Setuju	60	60
Setuju	57	57	Setuju	15	15
Sangat Setuju	8	8	Sangat Setuju	1	1
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 2

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 57 responden di Kota Solo (57%) setuju dengan terpilihnya Gibran sebagai Walikota Solo periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 27 responden (27%) mempersepsikan kurang setuju, 8 responden (8%) mempersepsikan sangat setuju, 6 responden (6%) mempersepsikan tidak setuju, dan 2 responden (2%) mempersepsikan sangat tidak setuju mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 60 responden di Kota Semarang (60%) kurang setuju dengan terpilihnya Gibran sebagai Walikota Solo periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 17 responden (17%) mempersepsikan tidak setuju, 15 responden (15%) mempersepsikan setuju, 7 responden (7%) mempersepsikan sangat tidak setuju, dan 1 responden (1%) mempersepsikan sangat setuju mengenai hal ini.

Pertanyaan kedua pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban setuju dengan nilai mean sebesar 3,63 di Kota Solo, serta kurang setuju dengan nilai mean sebesar 2,86 di Kota Semarang. Nilai ini dihasilkan dari rata-rata poin pada setiap jawaban yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak setuju 1 poin, tidak setuju 2 poin, kurang setuju 3 poin, setuju 4 poin, dan sangat setuju 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo setuju dengan terpilihnya Gibran sebagai Walikota Solo periode 2021-2024, dan sebagian besar masyarakat Kota Semarang kurang setuju dengan terpilihnya Gibran sebagai Walikota Solo periode 2021-2024.

3) Pendapat Masyarakat Mengenai Terpilihnya Gibran Sebagai Wakil Presiden Periode 2024-2029

Terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029 diwarnai berbagai persoalan, mulai dari usianya yang tidak sesuai dengan regulasi pemilu, hubungannya yang memburuk dengan PDI Perjuangan, jabatannya sebagai walikota yang belum tuntas, hingga pengalamannya di bidang politik yang masih sangat singkat. Berbagai persoalan tersebut memberikan perbedaan cara pandang masyarakat dalam menyikapi dan mempersepsikan tingkat kesetujuan mereka terhadap terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden. Berikut tabel data tingkat kesetujuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029:

Tabel 3. 19 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Terpilihnya Gibran Sebagai Wakil Presiden Periode 2024-2029

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	4	4	Sangat Tidak Setuju	11	11
Tidak Setuju	17	17	Tidak Setuju	19	19
Kurang Setuju	41	41	Kurang Setuju	62	62
Setuju	30	30	Setuju	7	7
Sangat Setuju	8	8	Sangat Setuju	1	1
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 3

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 41 responden di Kota Solo (41%) kurang setuju dengan terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. Sementara itu, sejumlah 30 responden (30%) mempersepsikan setuju, 17 responden (17%) mempersepsikan tidak setuju, 8 responden (8%) mempersepsikan sangat setuju, dan 4 responden (4%) mempersepsikan sangat tidak setuju mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 62 responden di Kota Semarang (62%) kurang setuju dengan terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. Sementara itu, sejumlah 19 responden (19%) mempersepsikan tidak setuju, 11 responden (11%) mempersepsikan sangat tidak setuju, 7 responden (7%) mempersepsikan setuju, dan 1 responden (1%) mempersepsikan sangat setuju mengenai hal ini.

Pertanyaan ketiga pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban kurang setuju dengan nilai mean sebesar 3,21 di Kota Solo dan 2,68 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak setuju 1 poin, tidak setuju 2 poin, kurang setuju 3 poin, setuju 4 poin, dan sangat setuju 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang kurang setuju dengan terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.

4) Pendapat Masyarakat Mengenai Terpilihnya Bobby Nasution Sebagai Walikota Medan Periode 2021-2024

Terpilihnya Bobby Nasution sebagai Walikota Medan pada Pilkada 2020 menimbulkan beragam persepsi dari masyarakat, mulai dari yang sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Beragam persepsi ini tidak terlepas dari status Bobby sebagai menantu Presiden Jokowi, dimana pada saat itu Presiden Jokowi masih aktif menjabat sebagai Presiden RI. Sebagai bagian dari perjalanan politik keluarga besar Presiden Jokowi, masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang memiliki pandangan tersendiri mengenai hal ini. Berikut tabel data pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai terpilihnya Bobby Nasution sebagai Walikota Medan periode 2021-2024:

**Tabel 3. 20 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang
Mengenai Terpilihnya Bobby Nasution Sebagai Walikota Medan Periode
2021-2024**

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	3	3	Sangat Tidak Setuju	6	6
Tidak Setuju	14	14	Tidak Setuju	13	13
Kurang Setuju	48	48	Kurang Setuju	72	72
Setuju	30	30	Setuju	9	9
Sangat Setuju	5	5	Sangat Setuju	0	0
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 4

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 48 responden di Kota Solo (48%) kurang setuju dengan terpilihnya Bobby Nasution sebagai Walikota Medan periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 30 responden (30%) mempersepsikan setuju, 14 responden (14%) mempersepsikan tidak setuju, 5 responden (5%) mempersepsikan sangat setuju, dan 3 responden (3%) mempersepsikan sangat tidak setuju mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 72 responden di Kota Semarang (72%) kurang setuju dengan terpilihnya Bobby Nasution sebagai Walikota Medan periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 13 responden (13%) mempersepsikan tidak setuju, 9 responden (9%) mempersepsikan setuju, 6 responden (6%) mempersepsikan sangat tidak setuju, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat tidak setuju mengenai hal ini.

Pertanyaan keempat pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban kurang setuju dengan nilai mean sebesar 3,20 di Kota Solo dan 2,84 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh

untuk jawaban sangat tidak setuju 1 poin, tidak setuju 2 poin, kurang setuju 3 poin, setuju 4 poin, dan sangat setuju 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang kurang setuju dengan terpilihnya Bobby Nasution sebagai Walikota Medan periode 2021-2024.

5) Pendapat Masyarakat Mengenai Pencalonan Bobby Nasution Sebagai Gubernur Sumatera Utara Periode 2024-2029

Setelah sukses terpilih sebagai Walikota Medan periode 2021-2024, Bobby Nasution mendapatkan dukungan dari gabungan partai Koalisi Indonesia Maju untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Majunya Bobby pada Pilkada Sumatera Utara 2024 mendapatkan beragam persepsi dari masyarakat, mulai dari yang sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Berikut tabel data tingkat kesetujuan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai pencalonan Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029:

Tabel 3. 21 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Pencalonan Bobby Nasution Sebagai Gubernur Sumatera Utara Periode 2024-2029

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	4	4	Sangat Tidak Setuju	7	7
Tidak Setuju	11	11	Tidak Setuju	14	14
Kurang Setuju	52	52	Kurang Setuju	68	68
Setuju	30	30	Setuju	11	11
Sangat Setuju	3	3	Sangat Setuju	0	0
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 5

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 52 responden di Kota Solo (52%) kurang setuju dengan pencalonan Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029. Sementara itu, sejumlah 30 responden (30%) mempersepsikan setuju, 11 responden (14%) mempersepsikan tidak setuju, 4 responden (4%) mempersepsikan sangat tidak setuju, dan 3 responden (3%) mempersepsikan sangat setuju mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 68 responden di Kota Semarang (68%) kurang setuju dengan pencalonan Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029. Sementara itu, sejumlah 14 responden (14%) mempersepsikan tidak setuju, 11 responden (11%) mempersepsikan setuju, 7 responden (7%) mempersepsikan sangat tidak setuju, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat setuju mengenai hal ini.

Pertanyaan kelima pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban kurang setuju dengan nilai mean sebesar 3,17 di Kota Solo dan 2,83 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak setuju 1 poin, tidak setuju 2 poin, kurang setuju 3 poin, setuju 4 poin, dan sangat setuju 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang kurang setuju dengan pencalonan Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029.

6) Pendapat Masyarakat Mengenai Terpilihnya Kaesang Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Periode 2023-2028

Penunjukan Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028 mengejutkan berbagai pihak. Langkah Kaesang yang secara tiba-tiba terjun ke politik dan langsung menempati posisi strategis partai

menimbulkan beragam reaksi dari publik, mulai dari yang mendukung hingga menolak. Berikut tabel data pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028:

Tabel 3. 22 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Terpilihnya Kaesang Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Periode 2023-2028

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	5	5	Sangat Tidak Setuju	7	7
Tidak Setuju	20	20	Tidak Setuju	28	28
Kurang Setuju	39	39	Kurang Setuju	57	57
Setuju	30	30	Setuju	8	8
Sangat Setuju	6	6	Sangat Setuju	0	0
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 6

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 39 responden di Kota Solo (39%) kurang setuju dengan terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028. Sementara itu, sejumlah 30 responden (30%) mempersepsikan setuju, 20 responden (20%) mempersepsikan tidak setuju, 6 responden (6%) mempersepsikan sangat setuju, dan 5 responden (5%) mempersepsikan sangat tidak setuju mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 57 responden di Kota Semarang (57%) kurang setuju dengan terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028. Sementara itu, sejumlah 28 responden (28%) mempersepsikan tidak setuju, 8 responden (8%) mempersepsikan setuju, 7

responden (7%) mempersepsikan sangat tidak setuju, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat setuju mengenai hal ini.

Pertanyaan keenam pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban kurang setuju dengan nilai mean sebesar 3,12 di Kota Solo dan 2,66 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak setuju 1 poin, tidak setuju 2 poin, kurang setuju 3 poin, setuju 4 poin, dan sangat setuju 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang kurang setuju dengan terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028.

7) Pendapat Masyarakat Mengenai Penunjukan Bagaskara Ikhlasulla Arif Sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero)

Sebagai keponakan Presiden Jokowi, penunjukan Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation Pertamina mendapatkan sorotan dari masyarakat. Meski jabatan yang diperoleh Bagaskara bukan merupakan jabatan politik, namun status Pertamina sebagai perusahaan milik negara menjadi perhatian tersendiri mengingat adanya potensi konflik kepentingan atau politisasi dalam penempatan posisi penting tersebut. Hal ini memicu pertanyaan tentang apakah penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan kapasitas dan kompetensi yang objektif, ataukah ada faktor kedekatan politik yang mempengaruhi keputusan tersebut. Berikut tabel data pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai penunjukan Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero):

**Tabel 3. 23 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang
Mengenai Penunjukkan Bagaskara Ikhlasulla Arif Sebagai Manager Non-
Government Relation PT Pertamina (Persero)**

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	5	5	Sangat Tidak Setuju	3	3
Tidak Setuju	10	10	Tidak Setuju	14	14
Kurang Setuju	57	57	Kurang Setuju	74	74
Setuju	27	27	Setuju	9	9
Sangat Setuju	1	1	Sangat Setuju	0	0
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 7

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 57 responden di Kota Solo (57%) kurang setuju dengan penunjukkan Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero). Sementara itu, sejumlah 27 responden (27%) mempersepsikan setuju, 10 responden (10%) mempersepsikan tidak setuju, 5 responden (5%) mempersepsikan sangat tidak setuju, dan 1 responden (1%) mempersepsikan sangat setuju mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 74 responden di Kota Semarang (74%) kurang setuju dengan penunjukkan Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero). Sementara itu, sejumlah 14 responden (14%) mempersepsikan tidak setuju, 9 responden (9%) mempersepsikan setuju, 3 responden (3%) mempersepsikan sangat tidak setuju, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat setuju mengenai hal ini.

Pertanyaan ketujuh pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban kurang setuju dengan nilai mean sebesar 3,09 di Kota Solo dan 2,89 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak setuju 1 poin, tidak setuju 2 poin, kurang setuju 3 poin, setuju 4 poin, dan sangat setuju 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang kurang setuju dengan penunjukan Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero).

8) Pendapat Masyarakat Mengenai Penunjukan Anwar Usman Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2018-2023

Sebelum masuk ke dalam keluarga besar Presiden Jokowi, Anwar Usman telah terlebih dahulu berkarir sebagai hakim konstitusi, bahkan juga pernah menjadi hakim agung dan menjadi dosen hukum tata negara di Universitas Indonesia. Pada tahun 2023, Anwar Usman yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar Presiden Jokowi mendapat sorotan dari publik mengenai keputusannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Hal ini menimbulkan kontroversi dari masyarakat, mengingat adanya hubungan kekerabatan antara Anwar Usman sebagai paman dari Gibran. Berikut tabel data pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai penunjukan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2018-2023:

**Tabel 3. 24 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang
Mengenai Penunjukkan Anwar Usman Sebagai Ketua Mahkamah
Konstitusi Periode 2018-2023**

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Setuju	6	6	Sangat Tidak Setuju	13	13
Tidak Setuju	24	24	Tidak Setuju	34	34
Kurang Setuju	44	44	Kurang Setuju	46	46
Setuju	24	24	Setuju	7	7
Sangat Setuju	2	2	Sangat Setuju	0	0
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 8

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 44 responden di Kota Solo (44%) kurang setuju dengan penunjukkan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2018-2023. Sementara itu, masing-masing sejumlah 24 responden (24%) mempersepsikan setuju dan tidak setuju, 6 responden (6%) mempersepsikan sangat tidak setuju, dan hanya 2 responden (2%) yang mempersepsikan sangat setuju mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 46 responden di Kota Semarang (46%) kurang setuju dengan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2018-2023. Sementara itu, sejumlah 34 responden (34%) mempersepsikan tidak setuju, 13 responden (13%) mempersepsikan sangat tidak setuju, 7 responden (7%) mempersepsikan setuju, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat setuju mengenai hal ini.

Pertanyaan kedelapan pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban kurang setuju dengan nilai mean sebesar 2,92 di Kota Solo dan 2,47 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh

untuk jawaban sangat tidak setuju 1 poin, tidak setuju 2 poin, kurang setuju 3 poin, setuju 4 poin, dan sangat setuju 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang kurang setuju dengan penunjukkan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2018-2023

9) Pendapat Masyarakat Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang Berpotensi Meningkatkan Risiko Korupsi di Kalangan Pemerintah

Berdasarkan kajian mengenai politik dinasti dalam perspektif demokrasi yang ditulis oleh Agus Dedi (2022), salah satu tantangan terbesar dalam membangun demokrasi yang bernilai adalah adanya fenomena politik dinasti. Menurutnya, jika politik dinasti terus dibiarkan, maka akan dapat memicu peningkatan kasus korupsi pada birokrasi pemerintahan, Ungkapan ini menimbulkan beragam persepsi dari masyarakat mengenai keterkaitan politik dinasti Presiden Jokowi dengan peningkatan risiko korupsi di kalangan pemerintah. Berikut tabel data mengenai pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi yang berpotensi meningkatkan risiko korupsi di kalangan pemerintah:

Tabel 3. 25 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang Berpotensi Meningkatkan Risiko Korupsi di Kalangan Pemerintah

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Merasa	5	5	Sangat Tidak Merasa	0	0
Tidak Merasa	13	13	Tidak Merasa	3	3
Kurang Merasa	23	23	Kurang Merasa	5	5
Merasa	51	51	Merasa	76	76
Sangat Merasa	8	8	Sangat Merasa	16	16
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 9

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 51 responden di Kota Solo (51%) merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi berpotensi meningkatkan risiko korupsi di kalangan pemerintah. Sementara itu, sejumlah 23 responden (23%) mempersepsikan kurang merasa, 13 responden (13%) mempersepsikan tidak merasa, 8 responden (8%) mempersepsikan sangat merasa, dan 5 responden (5%) mempersepsikan sangat tidak merasa mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 76 responden di Kota Semarang (76%) merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi berpotensi meningkatkan risiko korupsi di kalangan pemerintah. Sementara itu, sejumlah 16 responden (16%) mempersepsikan sangat merasa, 5 responden (5%) mempersepsikan kurang merasa, 3 responden (3%) mempersepsikan tidak merasa, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat tidak merasa mengenai hal ini.

Pertanyaan kesembilan pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban merasa dengan nilai mean sebesar 2,56 di Kota Solo dan 1,95 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak merasa 5 poin, tidak merasa 4 poin, kurang merasa 3 poin, merasa 2 poin, dan sangat merasa 1 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi berpotensi meningkatkan risiko korupsi di kalangan pemerintah.

10) Pendapat Masyarakat Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang Berpotensi Meningkatkan Risiko Kolusi di Kalangan Pemerintah

Selain berpotensi memicu peningkatan risiko korupsi, politik dinasti juga berpotensi meningkatkan risiko peningkatan kasus kolusi pada birokrasi pemerintahan. Menurut KBBI, kolusi dapat dipahami sebagai kerja sama rahasia atau persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah atau curang. Ungkapan ini menimbulkan beragam persepsi dari masyarakat mengenai keterkaitan politik dinasti Presiden Jokowi dengan peningkatan risiko kolusi di kalangan pemerintah. Berikut tabel data mengenai pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi yang berpotensi meningkatkan risiko kolusi di kalangan pemerintah:

Tabel 3. 26 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang Berpotensi Meningkatkan Risiko Kolusi di Kalangan Pemerintah

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Merasa	5	5	Sangat Tidak Merasa	0	0
Tidak Merasa	12	12	Tidak Merasa	2	2
Kurang Merasa	18	18	Kurang Merasa	5	5
Merasa	57	57	Merasa	80	80
Sangat Merasa	8	8	Sangat Merasa	13	13
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 10

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 57 responden di Kota Solo (57%) merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi berpotensi meningkatkan risiko kolusi di kalangan pemerintah. Sementara itu, sejumlah 18 responden (18%) mempersepsikan kurang merasa, 12 responden (12%) mempersepsikan tidak merasa, 8 responden (8%)

mempersepsikan sangat merasa, dan 5 responden (5%) mempersepsikan sangat tidak merasa mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 80 responden di Kota Semarang (80%) merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi berpotensi meningkatkan risiko kolusi di kalangan pemerintah. Sementara itu, sejumlah 13 responden (13%) mempersepsikan sangat merasa, 5 responden (5%) mempersepsikan kurang merasa, 2 responden (2%) mempersepsikan tidak merasa, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat tidak merasa mengenai hal ini.

Pertanyaan kesepuluh pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban merasa dengan nilai mean sebesar 2,49 di Kota Solo dan 1,96 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak merasa 5 poin, tidak merasa 4 poin, kurang merasa 3 poin, merasa 2 poin, dan sangat merasa 1 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi berpotensi meningkatkan risiko kolusi di kalangan pemerintah.

11) Pendapat Masyarakat Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang Berpotensi Meningkatkan Risiko Nepotisme di Kalangan Pemerintah

Nepotisme merupakan praktik memberikan jabatan, posisi, atau keuntungan kepada anggota keluarga atau orang terdekat, tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Berdasarkan kajian mengenai politik dinasti dalam perspektif demokrasi yang ditulis oleh Agus Dedi (2022), tantangan terbesar dalam membangun demokrasi yang bernilai adalah adanya fenomena politik dinasti, dimana hal ini dapat berpotensi

meningkatkan praktik nepotisme pada birokrasi pemerintahan, Ungkapan ini menimbulkan beragam persepsi dari masyarakat mengenai keterkaitan politik dinasti Presiden Jokowi dengan peningkatan risiko nepotisme di kalangan pemerintah. Berikut tabel data mengenai pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi yang berpotensi meningkatkan nepotisme korupsi di kalangan pemerintah:

Tabel 3. 27 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang Berpotensi Meningkatkan Risiko Nepotisme di Kalangan Pemerintah

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Merasa	3	3	Sangat Tidak Merasa	0	0
Tidak Merasa	14	14	Tidak Merasa	3	3
Kurang Merasa	18	18	Kurang Merasa	3	3
Merasa	51	51	Merasa	69	69
Sangat Merasa	14	14	Sangat Merasa	25	25
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 11

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 51 responden di Kota Solo (51%) merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi berpotensi meningkatkan risiko nepotisme di kalangan pemerintah. Sementara itu, sejumlah 18 responden (18%) mempersepsikan kurang merasa, 14 responden (14%) mempersepsikan tidak merasa dan sangat merasa, serta 3 responden (3%) mempersepsikan sangat tidak merasa mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 69 responden di Kota Semarang (69%) merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi berpotensi meningkatkan risiko

nepotisme di kalangan pemerintah. Sementara itu, sejumlah 25 responden (25%) mempersepsikan sangat merasa, 3 responden (3%) mempersepsikan tidak merasa dan sangat merasa, serta tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat tidak merasa mengenai hal ini.

Pertanyaan kesebelas pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban merasa dengan nilai mean sebesar 2,41 di Kota Solo dan 1,84 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak merasa 5 poin, tidak merasa 4 poin, kurang merasa 3 poin, merasa 2 poin, dan sangat merasa 1 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi berpotensi meningkatkan risiko nepotisme di kalangan pemerintah.

12) Pendapat Masyarakat Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Dalam kajian mengenai tinjauan kritis terhadap penerapan demokrasi di era Jokowi, ditemukan fakta bahwa terjadi penurunan indeks demokrasi di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Situasi ini tidak terlepas dari maraknya praktik politik dinasti di Indonesia yang dirasa mencederai nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara (Asitha Dewi Mustika Syanur dkk, 2023). Pendapat ini menimbulkan beragam reaksi dari publik, dimana sebagian ada yang setuju dan sebagian yang lain tidak setuju. Berikut tabel data mengenai pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi:

Tabel 3. 28 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Merasa	5	5	Sangat Tidak Merasa	1	1
Tidak Merasa	17	17	Tidak Merasa	5	5
Kurang Merasa	15	15	Kurang Merasa	4	4
Merasa	50	50	Merasa	70	70
Sangat Merasa	13	13	Sangat Merasa	20	20
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 12

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 50 responden di Kota Solo (50%) merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu, sejumlah 17 responden (17%) mempersepsikan tidak merasa, 15 responden (15%) mempersepsikan kurang merasa, 13 responden (13%) mempersepsikan sangat merasa, dan 5 responden (5%) mempersepsikan sangat tidak merasa mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 70 responden di Kota Semarang (70%) merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu, sejumlah 20 responden (20%) mempersepsikan sangat merasa, 5 responden (5%) mempersepsikan tidak merasa, 4 responden (4%) mempersepsikan kurang merasa, dan 1 responden (1%) mempersepsikan sangat tidak merasa mengenai hal ini.

Pertanyaan kedua belas pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban merasa dengan nilai mean sebesar 2,51 di Kota Solo dan 1,97 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai

ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak merasa 5 poin, tidak merasa 4 poin, kurang merasa 3 poin, merasa 2 poin, dan sangat merasa 1 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

13) Pendapat Masyarakat Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang Dapat Meningkatkan Stabilitas dalam Pemerintahan

Meski sering dipandang dalam konotasi negatif, ada sebagian kalangan yang melihat fenomena politik dinasti dari sisi sebaliknya. Bagi sebagian orang, politik dinasti dapat dipandang sebagai langkah yang tepat dalam meningkatkan stabilitas dan kesinambungan dalam pemerintahan. Hal ini terjadi karena penerus dari dalam keluarga umumnya memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan dan visi yang telah dirancang oleh pendahulu mereka. Berikut tabel data mengenai pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi yang dapat meningkatkan stabilitas dalam pemerintahan:

Tabel 3. 29 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang dapat Meningkatkan Stabilitas dalam Pemerintahan

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Merasa	7	7	Sangat Tidak Merasa	10	10
Tidak Merasa	33	33	Tidak Merasa	45	45
Kurang Merasa	32	32	Kurang Merasa	37	37
Merasa	21	21	Merasa	7	7
Sangat Merasa	7	7	Sangat Merasa	1	1
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 13

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 33 responden di Kota Solo (33%) tidak merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi dapat meningkatkan stabilitas dalam pemerintahan. Sementara itu, sejumlah 32 responden (32%) mempersepsikan kurang merasa, 21 responden (21%) mempersepsikan merasa, dan 7 responden (7%) masing-masing mempersepsikan sangat tidak merasa dan sangat merasa mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 45 responden di Kota Semarang (45%) tidak merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi dapat meningkatkan stabilitas dalam pemerintahan. Sementara itu, sejumlah 37 responden (37%) mempersepsikan kurang merasa, 10 responden (10%) mempersepsikan sangat tidak merasa, 7 responden (7%) mempersepsikan merasa, dan hanya ada 1 responden (1%) mempersepsikan sangat merasa mengenai hal ini.

Pertanyaan ketiga belas pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban tidak merasa dengan nilai mean sebesar 2,88 di Kota Solo dan 2,44 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak merasa 1 poin, tidak merasa 2 poin, kurang merasa 3 poin, merasa 4 poin, dan sangat merasa 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang tidak merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi dapat meningkatkan stabilitas dalam pemerintahan.

14) Pendapat Masyarakat Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang Dapat Memberikan Dampak Positif dalam Pembangunan Ekonomi

Bagi sebagian kalangan, politik dinasti dianggap sebagai sesuatu yang positif, karena dinilai dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa penerus dari dalam keluarga umumnya

memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan serta visi yang telah dirancang oleh pendahulu mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat saling berkesinambungan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Berikut tabel data mengenai pendapat masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi yang dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi:

Tabel 3. 30 Pendapat Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Politik Dinasti Presiden Jokowi yang dapat Memberikan Dampak Positif dalam Pembangunan Ekonomi

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Merasa	7	7	Sangat Tidak Merasa	13	13
Tidak Merasa	28	28	Tidak Merasa	41	41
Kurang Merasa	31	31	Kurang Merasa	40	40
Merasa	23	23	Merasa	5	5
Sangat Merasa	11	11	Sangat Merasa	1	1
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Afektif 14

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 31 responden di Kota Solo (31%) kurang merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi. Sementara itu, sejumlah 28 responden (28%) mempersepsikan tidak merasa, 23 responden (23%) mempersepsikan merasa, 11 responden (11%) mempersepsikan sangat merasa, dan 7 responden (7%) mempersepsikan sangat tidak merasa mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 41 responden di Kota Semarang (41%) tidak merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi dapat memberikan dampak positif

dalam pembangunan ekonomi. Sementara itu, sejumlah 40 responden (40%) mempersepsikan kurang merasa, 13 responden (13%) mempersepsikan sangat tidak merasa, 5 responden (5%) mempersepsikan merasa, dan hanya ada 1 responden (1%) yang mempersepsikan sangat merasa mengenai hal ini.

Pertanyaan keempat belas pada aspek afektif mendapatkan mayoritas jawaban kurang merasa dengan nilai mean sebesar 3,03 di Kota Solo, serta tidak merasa dengan nilai mean sebesar 2,40 di Kota Semarang. Nilai ini dihasilkan dari rata-rata poin pada setiap jawaban yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak merasa 1 poin, tidak merasa 2 poin, kurang merasa 3 poin, merasa 4 poin, dan sangat merasa 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo kurang merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi dapat meningkatkan stabilitas dalam pemerintahan, dan sebagian besar masyarakat Kota Semarang tidak merasa bahwa politik dinasti Presiden Jokowi dapat meningkatkan stabilitas dalam pemerintahan

15) Rekapitulasi Jawaban Afektif Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat perasaan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi, dilakukan rekapitulasi jawaban pada indikator afektif. Rekapitulasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat perasaan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi, dengan meninjau jawaban yang paling dominan dari 14 (empat belas) instrumen pertanyaan. Berikut adalah tabel data yang menunjukkan

rekapitulasi persentase jawaban kognitif masyarakat terhadap politik dinasti Presiden Jokowi:

Tabel 3. 31 Rekapitulasi Jawaban Afektif Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi

	Kota Solo					Kota Semarang				
	Sangat Tidak Setuju/ Tidak Merasa	Tidak Setuju/ /Tidak Merasa	Kurang Setuju/ Kurang Merasa	Setuju/ Merasa	Sangat Setuju/ Sangat Merasa	Sangat Tidak Setuju/ Tidak Merasa	Tidak Setuju/ /Tidak Merasa	Kurang Setuju/ Kurang Merasa	Setuju/ Merasa	Sangat Setuju/ Sangat Merasa
P1	8	38	25	25	4	14	48	31	6	0
P2	2	6	27	57	8	7	17	60	15	1
P3	4	17	41	30	8	11	19	62	7	1
P4	3	14	48	30	5	6	13	72	9	0
P5	4	11	52	30	3	7	14	68	11	0
P6	5	20	39	30	6	7	28	57	8	0
P7	5	10	57	27	1	3	14	74	9	0
P8	6	24	44	24	2	13	34	46	7	0
P9	5	13	23	51	8	0	3	5	76	16
P10	5	12	18	57	8	0	2	5	80	13
P11	3	14	18	51	14	0	3	3	69	25
P12	5	17	15	50	13	1	5	4	70	20
P13	7	33	32	21	7	10	45	37	7	1
P14	7	28	31	23	11	13	41	40	5	1

Sumber: Olahan Data Peneliti, Rekapitulasi Afektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban “setuju” pada instrumen pertanyaan kedua dan jawaban “merasa” pada instrumen pertanyaan kesepuluh menjadi jawaban yang paling dominan dalam aspek afektif masyarakat Kota Solo. Instrumen pertanyaan kedua pada penelitian ini adalah tingkat kesetujuan masyarakat mengenai terpilihnya Gibran Sebagai Walikota Solo periode 2021-2024, sedangkan instrumen pertanyaan kesepuluh pada penelitian ini adalah perasaan masyarakat mengenai politik dinasti presiden Jokowi yang berpotensi meningkatkan risiko kolusi di kalangan pemerintah. Total ada 57 dari 100 responden di Kota Solo yang memberikan jawaban “setuju” dan “merasa” pada pertanyaan ini.

Sementara itu, jawaban yang paling dominan dalam aspek afektif masyarakat Kota Semarang adalah jawaban “merasa” pada instrumen pertanyaan keseluruhan. Instrumen pertanyaan kesepuluh pada penelitian ini adalah perasaan masyarakat mengenai politik dinasti presiden Jokowi yang berpotensi meningkatkan risiko kolusi di kalangan pemerintah. Total ada 80 dari 100 responden di Kota Semarang yang memberikan jawaban “merasa” pada pertanyaan ini.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di kedua kota menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif dari praktik politik dinasti, khususnya yang berkaitan dengan potensi meningkatnya kolusi dalam pemerintahan. Meskipun sebagian responden di Kota Solo masih menunjukkan sikap setuju terhadap keterpilihan Gibran sebagai Walikota, hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan perasaan waspada terhadap risiko penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin timbul dari relasi kekeluargaan dalam politik. Artinya, secara afektif masyarakat mulai menyadari bahwa politik dinasti memiliki implikasi serius terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

16) Nilai Afektif Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi

Untuk dapat mengidentifikasi tingkat afektif pada persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi, maka interpretasi dilakukan dengan teknik analisa statistik deskriptif. Skor keseluruhan persepsi masyarakat pada indikator afektif dapat diperoleh melalui perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Skor Seluruh Kriteria} = \text{Jumlah Skor Tiap Kriteria} \times \text{Jumlah Responden} \times \text{Instrumen Pertanyaan}$$

Setiap kriteria jawaban pada indikator afektif memiliki poin skor yang beragam. Pada pertanyaan positif, poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak setuju/sangat tidak merasa 1 poin, tidak setuju/tidak merasa 2 poin, kurang setuju/kurang merasa 3 poin, setuju/merasa 4 poin, dan sangat setuju/sangat merasa 5 poin. Sementara itu, pada pertanyaan negatif poin yang diperoleh untuk jawaban sangat tidak setuju/sangat tidak merasa 5 poin, tidak setuju/tidak merasa 4 poin, kurang setuju/kurang merasa 3 poin, setuju/merasa 2 poin, dan sangat setuju/sangat merasa 1 poin. Adapun jumlah responden untuk penelitian di Kota Solo dan Kota Semarang adalah 100 orang dengan jumlah instrumen pertanyaan sebanyak 14 butir. Berikut adalah jumlah skor untuk setiap kriteria jawaban pada aspek afektif:

➤ Pertanyaan positif pada kuisioner yaitu pertanyaan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14 memiliki skor tiap kriteria jawaban adalah sebagai berikut:

- Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Merasa = $1 \times 100 \times 10 = 1.000$
- Tidak Setuju/Tidak Merasa = $2 \times 100 \times 10 = 2.000$
- Kurang Setuju/ Kurang Merasa = $3 \times 100 \times 10 = 3.000$
- Setuju/Merasa = $4 \times 100 \times 10 = 4.000$
- Sangat Setuju/Sangat Merasa = $5 \times 100 \times 10 = 5.000$

➤ Pertanyaan negatif pada kuisioner yaitu pertanyaan nomor 9,10,11,12 memiliki skor tiap kriteria jawaban adalah sebagai berikut:

- Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Merasa = $5 \times 100 \times 4 = 2.000$
- Tidak Setuju/Tidak Merasa = $4 \times 100 \times 4 = 1.600$
- Kurang Setuju/ Kurang Merasa = $3 \times 100 \times 4 = 1.200$
- Setuju/Merasa = $2 \times 100 \times 4 = 800$

- Sangat Setuju/Sangat Merasa = $1 \times 100 \times 4 = 400$

Pada indikator afektif, skor paling tinggi atau skor ideal yang bisa dicapai adalah 7.000 (5.000 + 2.000), sedangkan skor yang paling rendah yang bisa dicapai adalah 1.400 (1.000 + 400). Jumlah ini diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus jumlah skor seluruh kriteria sebagaimana yang tercantum diatas. Adapun interpretasi nilai pada indikator afektif adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Tabel Interval Indikator Afektif

Interval	Kategori
1.400 - 3.266	Rendah
3.267 - 5.133	Sedang
5.134 - 7.000	Tinggi

Sumber: Olahan Data Peneliti, Interval Afektif

Pada indikator afektif, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengukuran menggunakan skala likert, dimana rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data Tingkat Afektif Masyarakat} \\ = \frac{\text{Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data}}{\text{Jumlah Skor Ideal}} \\ (\text{Tertinggi}) \times 100\%$$

Selanjutnya, kriteria interpretasi rekapitulasi skor tingkat afektif, masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Tabel Interpretasi Indikator Afektif

Interval	Kategori
20% - 46,6%	Rendah
46,7% - 73,3%	Sedang
73,4% - 100%	Tinggi

Sumber: Olahan Data Peneliti, Interpretasi Afektif

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, jumlah skor hasil pengumpulan data tingkat afektif masyarakat di Kota Solo mencapai 4.507, atau setara dengan 64,39 %. Sementara itu, jumlah skor hasil pengumpulan data tingkat afektif masyarakat di Kota Semarang adalah 4.263, atau setara dengan 60,90%. Dengan perolehan angka tersebut, interpretasi perasaan masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi termasuk ke dalam kategori sedang.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang memiliki kecenderungan rasa kurang setuju terhadap politik dinasti Presiden Jokowi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai afektif yang berada pada tingkat sedang. Perasaan tersebut mencakup rasa kurang setuju terhadap aktivitas dan jabatan politik yang dimiliki oleh anggota keluarga Presiden Jokowi, hingga kecenderungan untuk kurang setuju dengan pernyataan yang menyoroti dampak positif dari politik dinasti Presiden Jokowi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti paparan informasi melalui media massa, aktivitas politik yang melibatkan anggota keluarga Presiden Jokowi, serta perhatian publik terhadap jabatan strategis yang mereka miliki.

3.2.3 Aspek Evaluatif (Penilaian)

Aspek evaluatif adalah aspek yang berkaitan dengan penilaian rasional individu terhadap objek, dengan mengevaluasi kinerja ataupun sistem dari objek yang dipersepsikan. Dalam penelitian ini, aspek evaluatif erat kaitannya dengan penilaian masyarakat terhadap baik atau buruknya kinerja dari setiap anggota keluarga Presiden Jokowi, serta penilaian secara menyeluruh mengenai dampak

yang dihasilkan dari politik dinasti Presiden Jokowi terhadap dinamika politik nasional.

1) Penilaian Masyarakat Mengenai Kinerja Gibran sebagai Walikota Solo Periode 2021-2024

Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Walikota Solo periode 2021-2023 pada tanggal 2 Februari 2021. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual, dimana Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah pada saat itu tidak dapat melantik secara langsung karena masih dalam keterbatasan Covid-19. Pada tanggal 16 Juli 2024, Gibran yang baru saja dinyatakan terpilih sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 secara resmi mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai Walikota Solo ke kantor DPRD Kota Surakarta. Sepanjang kiprahnya sebagai Walikota Solo dalam kurun waktu 2021-2024, Gibran telah banyak membuat gebrakan mulai dari merevitalisasi berbagai ruang publik dan tempat rekreasi, hingga membangun Masjid Raya Sheikh Zayed yang menjadi salah satu ikon baru di Kota Solo. Berikut tabel data penilaian masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai kinerja Gibran sebagai Walikota Solo periode 2021-2024:

Tabel 3. 34 Penilaian Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Kinerja Gibran sebagai Walikota Solo Periode 2021-2024

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Buruk	3	3	Sangat Buruk	4	4
Buruk	9	9	Buruk	9	9
Cukup	43	43	Cukup	77	77
Baik	33	33	Baik	8	8
Sangat Baik	12	12	Sangat Baik	2	2
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Evaluatif 1

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 43 responden di Kota Solo (43%) memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Gibran sebagai Walikota Solo periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 33 responden (33%) mempersepsikan baik, 12 responden (12%) mempersepsikan sangat baik, 9 responden (9%) mempersepsikan buruk, dan 3 responden (3%) mempersepsikan sangat buruk mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 77 responden di Kota Semarang (77%) memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Gibran sebagai Walikota Solo periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 9 responden (9%) mempersepsikan buruk, 8 responden (8%) mempersepsikan baik, 4 responden (4%) mempersepsikan sangat buruk, dan 2 responden (2%) mempersepsikan sangat baik mengenai hal ini.

Pertanyaan pertama pada aspek evaluatif mendapatkan mayoritas jawaban cukup dengan nilai mean sebesar 3,42 di Kota Solo dan 2,95 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat buruk 1 poin, buruk 2 poin, cukup 3 poin, baik 4 poin, dan sangat baik 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Gibran sebagai Walikota Solo periode 2021-2024.

2) Penilaian Masyarakat Mengenai Kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden Periode 2024-2029

Tiga bulan setelah mengundurkan diri sebagai Walikota Solo, Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-

2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024, bertempat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Setelah dilantik, Gibran langsung tancap gas dengan menjalankan berbagai agenda strategis, termasuk menghadiri rapat kabinet perdana, merancang program prioritas, serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran jalannya pemerintahan. Salah satu program prioritas dari Prabowo-Gibran adalah makan siang bergizi gratis yang sudah beberapa bulan terakhir mulai diimplementasikan. Berikut tabel data penilaian masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029:

Tabel 3. 35 Penilaian Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Kinerja Gibran Wakil Presiden Periode 2024-2029

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Buruk	2	2	Sangat Buruk	6	6
Buruk	11	11	Buruk	9	9
Cukup	56	56	Cukup	81	81
Baik	24	24	Baik	3	3
Sangat Baik	7	7	Sangat Baik	1	1
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Evaluatif 2

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 56 responden di Kota Solo (56%) memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. Sementara itu, sejumlah 24 responden (24%) mempersepsikan baik, 11 responden (11%) mempersepsikan buruk, 7 responden (7%) mempersepsikan sangat baik, dan

hanya ada 1 responden (1%) yang mempersepsikan sangat buruk mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 81 responden di Kota Semarang (81%) memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. Sementara itu, sejumlah 9 responden (9%) mempersepsikan buruk, 6 responden (6%) mempersepsikan sangat buruk, 3 responden (3%) mempersepsikan baik, dan hanya ada 1 responden (1%) yang mempersepsikan sangat baik mengenai hal ini.

Pertanyaan kedua pada aspek evaluatif mendapatkan mayoritas jawaban cukup dengan nilai mean sebesar 3,23 di Kota Solo dan 2,84 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat buruk 1 poin, buruk 2 poin, cukup 3 poin, baik 4 poin, dan sangat baik 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.

3) Penilaian Masyarakat Mengenai Kinerja Bobby Nasution sebagai Walikota Medan Periode 2021-2024

Sejak dilantik sebagai Walikota Medan pada 26 Februari 2021, Bobby Nasution telah banyak menorehkan sederet pencapaian kinerja, baik pencapaian yang bersifat positif maupun pencapaian yang menuai kritik. Sebagai menantu Presiden, kinerja Bobby sebagai walikota tidak hanya disorot oleh masyarakat Kota Medan saja melainkan juga menjadi perhatian publik secara nasional. Berikut tabel data penilaian masyarakat Kota Solo

dan Kota Semarang mengenai kinerja Bobby Nasution sebagai Walikota Medan periode 2021-2024:

Tabel 3. 36 Penilaian Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Kinerja Bobby Nasution sebagai Walikota Medan Periode 2021-2024

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Buruk	2	2	Sangat Buruk	4	4
Buruk	18	18	Buruk	8	8
Cukup	58	58	Cukup	83	83
Baik	19	19	Baik	5	5
Sangat Baik	3	3	Sangat Baik	0	0
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Evaluatif 3

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 58 responden di Kota Solo (58%) memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Bobby Nasution sebagai Walikota Medan periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 19 responden (19%) mempersepsikan baik, 18 responden (18%) mempersepsikan buruk, 3 responden (3%) mempersepsikan sangat baik, dan 2 responden (2%) mempersepsikan sangat buruk mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 83 responden di Kota Solo (83%) memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Bobby Nasution sebagai Walikota Medan periode 2021-2024. Sementara itu, sejumlah 8 responden (8%) mempersepsikan buruk, 5 responden (5%) mempersepsikan baik, 4 responden (4%) mempersepsikan sangat buruk, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat buruk mengenai hal ini.

Pertanyaan ketiga pada aspek evaluatif mendapatkan mayoritas jawaban cukup dengan nilai mean sebesar 3,03 di Kota Solo dan 2,89 di Kota

Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat buruk 1 poin, buruk 2 poin, cukup 3 poin, baik 4 poin, dan sangat baik 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Bobby Nasution sebagai Walikota Medan periode 2021-2024.

4) Penilaian Masyarakat Mengenai Kinerja Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Periode 2023-2028

Sejak ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 25 September 2023, Kaesang telah menghasilkan beberapa keputusan politik penting untuk PSI. Salah satu keputusan Kaesang yang paling fenomenal adalah keputusan untuk membawa Partai Solidaritas Indonesia bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Berikut tabel data penilaian masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai kinerja Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028:

Tabel 3. 37 Penilaian Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Kinerja Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Periode 2023-2028

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Buruk	0	0	Sangat Buruk	8	8
Buruk	33	33	Buruk	26	26
Cukup	38	38	Cukup	59	59
Baik	23	23	Baik	7	7
Sangat Baik	6	6	Sangat Baik	0	0
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Evaluatif 4

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 38 responden di Kota Solo (38%) memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028. Sementara itu, sejumlah 33 responden (33%) mempersepsikan buruk, 23 responden (23%) mempersepsikan baik, 6 responden (6%) mempersepsikan sangat baik, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat buruk mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 59 responden di Kota Semarang (59%) memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028. Sementara itu, sejumlah 26 responden (26%) mempersepsikan buruk, 8 responden (8%) mempersepsikan sangat buruk, 7 responden (7%) mempersepsikan baik, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat baik mengenai hal ini.

Pertanyaan keempat pada aspek evaluatif mendapatkan mayoritas jawaban cukup dengan nilai mean sebesar 3,02 di Kota Solo dan 2,65 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat buruk 1 poin, buruk 2 poin, cukup 3 poin, baik 4 poin, dan sangat baik 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028

- 5) Penilaian Masyarakat Mengenai Kinerja Bagaskara Ikhlasmalla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero)

Bagaskara Ikhlasulla Arif telah banyak mendapatkan atensi dari publik setelah dirinya ditunjuk sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero) pada tahun 2024. Statusnya sebagai keponakan Presiden Jokowi telah memberikan beban tersendiri bagi Bagaskara untuk dapat membuktikan kapasitasnya sebagai petinggi Pertamina. Berikut tabel data penilaian masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai kinerja Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero):

Tabel 3. 38 Penilaian Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Kinerja Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero)

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Buruk	2	2	Sangat Buruk	1	1
Buruk	14	14	Buruk	8	8
Cukup	74	74	Cukup	87	87
Baik	9	9	Baik	4	4
Sangat Baik	1	1	Sangat Baik	0	0
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Evaluatif 5

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 74 responden di Kota Solo (74%) memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero). Sementara itu, sejumlah 14 responden (14%) mempersepsikan buruk, 9 responden (9%) mempersepsikan baik, 2 responden (2%) mempersepsikan sangat buruk, dan hanya ada 1 responden (1%) yang mempersepsikan sangat baik mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 87 responden di Kota Semarang (87%) memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager

Non-Government Relation PT Pertamina (Persero). Sementara itu, sejumlah 8 responden (8%) mempersepsikan buruk, 4 responden (4%) mempersepsikan baik, 1 responden (1%) mempersepsikan sangat buruk, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat baik mengenai hal ini.

Pertanyaan kelima pada aspek evaluatif mendapatkan mayoritas jawaban cukup dengan nilai mean sebesar 2,93 di Kota Solo dan 2,94 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat buruk 1 poin, buruk 2 poin, cukup 3 poin, baik 4 poin, dan sangat baik 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero).

6) Penilaian Masyarakat Mengenai Kinerja Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2018-2023

Anwar Usman telah memperoleh jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2018, atau empat tahun sebelum dirinya menikah dengan Idayati dan menjadi bagian dari keluarga besar Presiden Jokowi. Sepanjang karir kepemimpinannya di Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman mulai mendapat sorotan publik secara luas setelah mengeluarkan putusan kontroversial yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Berikut tabel data penilaian masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai kinerja Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023:

**Tabel 3. 39 Penilaian Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang
Mengenai Kinerja Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi
Periode 2018-2023**

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Buruk	13	13	Sangat Buruk	19	19
Buruk	36	36	Buruk	50	50
Cukup	37	37	Cukup	28	28
Baik	13	13	Baik	3	3
Sangat Baik	1	1	Sangat Baik	0	0
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Evaluatif 6

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 37 responden di Kota Solo (37%) memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023. Sementara itu, sejumlah 36 responden (36%) mempersepsikan buruk, masing-masing 13 responden (13%) mempersepsikan sangat buruk dan baik, dan hanya ada 1 responden (1%) yang mempersepsikan sangat baik mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 50 responden di Kota Solo (50%) memberikan penilaian buruk terhadap kinerja Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023. Sementara itu, sejumlah 28 responden (28%) mempersepsikan cukup, 19 responden (19%) mempersepsikan sangat buruk, 3 responden (3%) mempersepsikan baik, dan tidak ada satupun responden yang mempersepsikan sangat baik mengenai hal ini.

Pertanyaan keenam pada aspek evaluatif mendapatkan mayoritas jawaban cukup dengan nilai mean sebesar 2,53 di Kota Solo, serta buruk dengan nilai mean sebesar 2,15 di Kota Semarang. Nilai ini dihasilkan dari rata-rata poin pada setiap jawaban yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat buruk 1 poin, buruk 2 poin, cukup 3 poin, baik 4 poin, dan sangat baik 5 poin. Dengan begitu, dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo memberikan penilaian cukup terhadap kinerja Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023, dan sebagian besar masyarakat Kota Semarang memberikan penilaian buruk terhadap kinerja Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023.

7) Penilaian Masyarakat Mengenai Dampak yang Dihasilkan Politik Dinasti Presiden Jokowi Terhadap Dinamika Politik Nasional

Fenomena politik dinasti telah memunculkan beragam reaksi di masyarakat mengenai dampak yang dihasilkan terhadap dinamika politik nasional, Sebagian pihak menilai bahwa keberlanjutan kekuasaan dalam satu keluarga dapat memungkinkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, melemahkan prinsip meritokrasi, serta membatasi kesempatan bagi individu di luar lingkaran keluarga untuk berkompetisi secara adil dalam politik. Sementara itu, sebagian yang lain menilai politik dinasti dapat menjamin stabilitas kebijakan dan kesinambungan program pemerintahan. Perdebatan ini terus berkembang seiring dengan mencuatnya kasus politik dinasti Presiden Jokowi. Berikut tabel data penilaian masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang mengenai dampak yang dihasilkan politik dinasti Presiden Jokowi terhadap dinamika politik nasional:

Tabel 3. 40 Penilaian Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang Mengenai Dampak yang Dihasilkan Politik Dinasti Presiden Jokowi Terhadap Dinamika Politik Nasional

Kota Solo			Kota Semarang		
Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Buruk	14	14	Sangat Buruk	19	19
Buruk	49	49	Buruk	67	67
Cukup	10	10	Cukup	9	9
Baik	18	18	Baik	4	4
Sangat Baik	9	9	Sangat Baik	1	1
Total	100	100	Total	100	100

Sumber: Olahan Data Peneliti, Pertanyaan Evaluatif 7

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah 49 responden di Kota Solo (49%) memberikan penilaian buruk mengenai dampak yang dihasilkan politik dinasti Presiden Jokowi terhadap dinamika politik nasional. Sementara itu, sejumlah 18 responden (18%) mempersepsikan baik, 14 responden (14%) mempersepsikan sangat buruk, 10 responden (10%) mempersepsikan cukup, dan 9 responden (9%) mempersepsikan sangat baik mengenai hal ini.

Adapun sejumlah 67 responden di Kota Solo (67%) memberikan penilaian buruk mengenai dampak yang dihasilkan politik dinasti Presiden Jokowi terhadap dinamika politik nasional. Sementara itu, sejumlah 19 responden (19%) mempersepsikan sangat buruk, 9 responden (9%) mempersepsikan cukup, 4 responden (4%) mempersepsikan baik, dan hanya ada 1 responden (1%) yang mempersepsikan sangat baik mengenai hal ini.

Pertanyaan ketujuh pada aspek evaluatif mendapatkan mayoritas jawaban buruk dengan nilai mean sebesar 2,59 di Kota Solo dan 2,05 di Kota Semarang yang diperoleh dari 100 responden di masing-masing wilayah. Nilai ini diperoleh dari rata-rata poin pada setiap jawaban, dimana poin yang diperoleh untuk jawaban sangat buruk 1 poin, buruk 2 poin, cukup 3 poin, baik 4 poin, dan sangat baik 5 poin. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang memberikan penilaian buruk mengenai dampak yang dihasilkan politik dinasti Presiden Jokowi terhadap dinamika politik nasional.

- 8) Rekapitulasi Jawaban Evaluatif Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat penilaian masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi, dilakukan rekapitulasi jawaban pada indikator evaluatif. Rekapitulasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat penilaian masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi, dengan meninjau jawaban yang paling dominan dari 7 (tujuh) instrumen pertanyaan. Berikut adalah tabel data yang menunjukkan rekapitulasi persentase jawaban evaluatif masyarakat terhadap politik dinasti Presiden Jokowi:

Tabel 3. 41 Rekapitulasi Jawaban Evaluatif Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi

	Kota Solo					Kota Semarang				
	Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
P1	3	9	43	33	12	4	9	77	8	2
P2	2	11	56	24	7	6	9	81	3	1
P3	2	18	58	19	3	4	8	83	5	0
P4	0	33	38	23	6	8	26	59	7	0
P5	2	14	74	9	1	1	8	87	4	0
P6	13	36	37	13	1	19	50	28	3	0
P7	14	49	10	18	9	19	67	9	4	1

Sumber: Olahan Data Peneliti, Rekapitulasi Kognitif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban “cukup” pada instrumen pertanyaan kelima menjadi jawaban yang paling dominan dalam aspek evaluatif masyarakat Kota Solo. Instrumen pertanyaan kelima pada penelitian ini adalah penilaian masyarakat mengenai kinerja Bagaskara Ikhlasmulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero). Total ada 74 dari 100 responden di Kota Solo yang memberikan jawaban “cukup” pada pertanyaan ini.

Sama seperti di Kota Solo, jawaban yang paling dominan dalam aspek evaluatif masyarakat Kota Semarang adalah jawaban “cukup” pada instrumen pertanyaan kelima. Total ada 87 dari 100 responden di Kota Semarang yang memberikan jawaban “cukup” pada pertanyaan ini.

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di kedua kota cenderung memberikan penilaian yang kurang baik terhadap kinerja anggota keluarga Presiden Jokowi yang menempati posisi strategis di pemerintahan maupun BUMN. Dominasi jawaban “cukup” pada instrumen evaluatif ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya puas terhadap kinerja yang ditampilkan. Hal ini memperkuat adanya persepsi negatif yang berkembang di masyarakat terkait praktik politik dinasti, di mana hubungan kekerabatan dinilai tidak selalu sejalan dengan kualitas atau kapabilitas individu dalam menjalankan tugas publik.

9) Nilai Evaluatif Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi

Untuk dapat mengidentifikasi tingkat evaluatif pada persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi, maka interpretasi dilakukan dengan teknik analisa statistik deskriptif. Skor keseluruhan persepsi masyarakat pada indikator evaluatif dapat diperoleh melalui perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Skor Seluruh Kriteria} = \text{Jumlah Skor Tiap Kriteria} \times \text{Jumlah Responden} \times \text{Instrumen Pertanyaan}$$

Setiap kriteria jawaban memiliki poin skor yang beragam, dimana pada aspek evaluatif poin yang diperoleh untuk jawaban sangat buruk 1 poin, buruk 2 poin, cukup 3 poin, baik 4 poin, dan sangat baik 5 poin. Adapun jumlah responden untuk penelitian di Kota Solo dan Kota Semarang adalah

100 orang dengan jumlah instrumen pertanyaan sebanyak 7 butir. Berikut adalah jumlah skor untuk setiap kriteria jawaban pada aspek evaluatif:

- Sangat Buruk = $1 \times 100 \times 7 = 700$
- Buruk = $2 \times 100 \times 7 = 1.400$
- Cukup = $3 \times 100 \times 7 = 2.100$
- Baik = $4 \times 100 \times 7 = 2.800$
- Sangat Baik = $5 \times 100 \times 7 = 3.500$

Pada indikator evaluatif, skor paling tinggi atau skor ideal yang bisa dicapai adalah 3.500, sedangkan skor yang paling rendah yang bisa dicapai adalah 700. Jumlah ini diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus jumlah skor seluruh kriteria sebagaimana yang tercantum diatas. Adapun interpretasi nilai pada indikator evaluatif adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 42 Tabel Interval Indikator Evaluatif

Interval	Kategori
700 - 1.633	Rendah
1.634 - 2.567	Sedang
2.568 - 3.500	Tinggi

Sumber: Olahan Data Peneliti, Interval Evaluatif

Pada indikator evaluatif, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengukuran menggunakan skala likert, dimana rumus yang digunakan adalah:

Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data Tingkat Evaluatif

Masyarakat = Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data/Jumlah Skor

Ideal (Tertinggi) X 100%

Selanjutnya, kriteria interpretasi rekapitulasi skor tingkat evaluatif masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 43 Tabel Interpretasi Indikator Evaluatif

Interval	Kategori
20% - 46,6%	Rendah
46,7% - 73,3%	Sedang
73,4% - 100%	Tinggi

Sumber: Olahan Data Peneliti, Interpretasi Evaluatif

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, jumlah skor hasil pengumpulan data tingkat evaluatif masyarakat di Kota Solo mencapai 2.075, atau setara dengan 59,29%. Sementara itu, jumlah skor hasil pengumpulan data tingkat kognitif masyarakat di Kota Semarang adalah 1.843, atau setara dengan 52,66%. Dengan perolehan angka tersebut, interpretasi penilaian masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi termasuk ke dalam kategori sedang.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang memberikan penilaian cukup terhadap politik dinasti Presiden Jokowi. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap kinerja dari setiap anggota keluarga Presiden Jokowi, hingga penilaian mengenai dampak politik dinasti Presiden Jokowi terhadap dinamika politik nasional. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti paparan informasi melalui media massa, aktivitas politik yang melibatkan anggota keluarga Presiden Jokowi, serta perhatian publik terhadap jabatan strategis yang mereka miliki.

